

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR BAGAN	V
DAFTAR SINGKATAN	VI
ABSTRAKSI	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tinjauan Pustaka	5
a. Demokrasi <i>Mainstream</i> (Prosedural) dan Ketiadaan Ide Tautan Politik.....	6
b. “Defisit Demokrasi”, Representasi, dan Lemahnya Tautan Politik.....	8
c. Redefinisi Demokrasi Representasi dan Sentralitas Tautan Politik.	11
d. Konsep Tautan Politik (<i>Political linkage</i>) Antara Parlemen dan Masyarakat Sipil.....	13
1) Gagasan Dasar Tautan Politik.....	14
2) Jenis-jenis Tautan Politik.....	15
3) Tautan Politik dan Masyarakat Sipil yang Terpolitisasi.....	19
4. Kerangka Analisa	24
5. Metode Penelitian	27
6. Struktur Disertasi.....	30
BAB II POLITIK KEBIJAKAN DAN TAUTAN POLITIK DI ERA ORDE BARU	32
1. Pola dan watak politik Kebijakan di Era Orde Baru.....	33
2. Studi Kasus tiga produk perundangan.....	41
a. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.....	41
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.....	50
c. Lima paket UU Politik Orde Baru Tahun 1985.....	54
3. Kesimpulan	57
BAB III TAUTAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI	59
1. Pengantar	59
2. Membaca Ulang Kelahiran Undang-Undang Pornografi	60

a.	Periode 1999-2004: Kebuntuan Penyusunan RUU Antipornografi dan Pornoaksi (RUU-APP).....	61
b.	Proses Penyusunan UU Pornografi Periode 2004-2009: Antara Moralitas dan Humanitas.....	64
3.	Proses Formasi Tautan OMS – Parlemen dalam Penyusunan UU AP	71
a.	Peta Aktor OMS: Kelompok Perempuan vs Kelompok Islam.....	71
b.	Formasi Tautan Intern OMS: Konsolidasi Berbasis Isu dan Ruang.....	80
1)	Konsolidasi Kelompok Perempuan	80
2)	Konsolidasi Kelompok Adat	87
3)	Konsolidasi Kelompok Budayawan dan Pekerja Seni	94
4)	Konsolidasi Kelompok Keagamaan.....	98
5)	Kelompok Pemuda dan Mahasiswa.....	101
4.	Mekanisme Tautan OMS-Parlemen: Tautan Informal dan Formal	106
5.	Karakteristik Tautan politik RUU AP: Aktor, Substansi kebijakan, dan Strategi.....	110
BAB IV TAUTAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG		
NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH.....		114
1.	Pengantar	114
2.	Konteks RUU PA dan Terbentuknya Jaringan Demokrasi Aceh.....	115
3.	JDA: Aksi dan Strategi Mengawal Pembahasan RUU PA di Parlemen NAD	127
4.	JDA dan Pertarungan RUU PA di Pusat	131
5.	Tautan Politik JDA-Parlemen: Aktor, substansi kebijakan, dan strategi.....	146
BAB V TAUTAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG		
NO. 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA.....		150
1.	Pengantar	150
2.	Sejarah Penyusunan RUU Pertahanan : Kerjasama Pemerintah, Akademisi, dan OMS yang Sulit Terulang.....	152
3.	Proses Pembentukan Tautan.....	155
a.	Peta OMS : Konsolidasi OMS di Isu Reformasi Sektor Keamanan dan Hak Asasi Manusia	155
b.	Mekanisme Tautan OMS-Parlemen.....	162
1)	OMS– Kementerian Pertahanan : Panja RUU Pertahanan	162
2)	OMS – Parlemen: Pansus RUU Pertahanan Negara.....	170
3)	Advokasi OMS ke DPR : Fase Agenda Setting RUU Pertahanan Negara.....	171
4)	Advokasi OMS ke DPR : fase negosiasi draft ke parlemen.....	174
5)	Advokasi OMS ke DPR : Tahapan formalisasi.....	176

6) Sosialisasi	179
4. Kesimpulan: tipologi tautan politik.....	180
BAB VI KESIMPULAN	183
1. Aktor, Proses, dan Isu	184
2. Tipologi Tautan Politik.....	187
3. Implikasi Teoritik.....	191
DAFTAR PUSTAKA	199